

**SINERGITAS YONIF MEKANIS 202/TJ POLRI DAN PEMDA DALAM  
PENANGANAN POTENSI KONFLIK PILKADA SERENTAK DI KOTA BEKASI  
TAHUN 2018**

**INFANTRY BATTALION MECHANIZED 202/TAJIMALELA SINERGY WITH  
POLICE AND LOCAL GOVERNMENT IN HANDLING POTENTIAL CONFLICT  
ELECTION SIMULTANEOUSLY IN BEKASI**

**Deden Ika Drajat<sup>1</sup>, Bambang Wahyudi<sup>2</sup>, Haposan Simatupang<sup>3</sup>**

Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas  
Pertahanan  
(drajatdedenika@gmail.com)

**Abstrak** -- Tahun 2018 merupakan tahun politik yang akan menjadi tahun pertama Indonesia menjalani pemilihan kepala daerah serentak dan berlanjut hingga 2019 melaksanakan pemilihan presiden. Pada tahun-tahun politik tidak dapat diungkiri terdapat banyak sekali kemungkinan terjadinya konflik-konflik dalam masyarakat dikarenakan perbedaan preferensi pemilihan ataupun hal lainnya yang berhubungan dengan kontestasi pemilihan politik. Kota Bekasi merupakan wilayah kota yang menjadi penyangga Ibukota Jakarta sehingga Kota Bekasi menjadi wilayah yang cukup padat di tinggali dan pada Kota Bekasi juga terdapat banyak potensi konflik yang dapat terjadi kapan saja. Yonif Mekanis 202/Tajimalela merupakan salah satu garda terdepan TNI yang memiliki tugas dan fungsi untuk memastikan pertahanan dan keamanan negara dari berbagai gangguan yang mengancam NKRI termasuk konflik sosial yang terjadi pada saat pemilu 2018. Tujuan penulisan Tesis ini adalah untuk menjabarkan sinergitas dari koordinasi antara Yonif Mekanis 202/Tajimalela, Kepolisian Resor Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi terhadap langkah penanganan potensi konflik yang bila terjadi pada pelaksanaan pilkada serentak di Kota Bekasi Tahun 2018. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berbentuk studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan langkah: *Data Reduction* (reduksi data), *Data Display* (penyajian data), dan *Conclusion Verification* (penarikan kesimpulan). Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah berjalan baiknya sinergitas antara instansi-instansi terkait dalam langkah penanganan konflik sosial saat pemilu di Kota Bekasi dikarenakan besarnya potensi konflik yang dapat terjadi dalam setiap tahun politik di Indonesia.

**Kata kunci:** *sinergitas, penanganan potensi konflik, pilkada serentak*

**Abstract** -- 2018 is a political year that will be the first year of Indonesia will undergo simultaneous regional elections and continue until 2019 to hold a presidential election. In the political years it

---

<sup>1</sup> Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

<sup>2</sup> Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

<sup>3</sup> Program Studi Strategi dan Kampanye Militer, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

cannot be denied that there are many possibilities for conflicts in society due to differences in election preferences or other matters related to the contestation of political elections. Bekasi city is a city area that is a buffer for the capital city of Jakarta so that the Bekasi city is a fairly densely populated area and in the Bekasi city there are also many potential conflicts that can occur at any time. Mechanic Battalion 202 / Tajimalela is one of the front guard of the TNI that has the duty and function to ensure state defense and security from various threats that threaten the NKRI including the social conflicts that occurred during the 2018 election. Mekanis 202 / Tajimalela, Bekasi City Police Department and Bekasi City Government regarding the steps to deal with potential conflicts that occur when implementing simultaneous regional elections in Bekasi City in 2018. The design of this study uses qualitative methods in the form of case studies. Data collection techniques used in the form of library research. In accordance with the approach method applied, the data obtained for this study were analyzed by descriptive qualitative method with steps: Data Reduction, Data Display, and Conclusion Verification. The results found in this study are that the synergy between the relevant agencies is proceeding well in the steps to deal with social conflicts during elections in Bekasi City due to the large potential of conflicts that can occur in any political year in Indonesia.

**Keywords:** *synergy, the handling of potential conflicts, the local elections to be held simultaneously*

## Pendahuluan

P erkembangan situasi nasional pada tahun 2018 akan diwarnai dengan suhu politik yang cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan pada tahun tersebut merupakan tahun politik dimana pada tanggal 27 Juni 2018 berlangsung pilkada serentak di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten<sup>4</sup>. Demikian juga pada tahun 2018 sudah dimulai tahapan persiapan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan digelar serentak pada tanggal 17 April 2019. Khusus untuk pilkada serentak, bangsa Indonesia telah memiliki dua kali pengalaman pada pilkada serentak Tahun 2015 dan Tahun 2017 yang keseluruhannya relatif berjalan aman dan

lancar. Sementara untuk pilkada serentak memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, merupakan pengalaman pertama. Intinya adalah dua agenda besar bangsa Indonesia dalam tahun politik mendatang membawa risiko besar juga sehingga perlu diantisipasi secara dini. Terkait pilkada serentak di 171 daerah yang terdiri atas 17 provinsi untuk memilih gubernur/wakil gubernur, 39 kota untuk memilih wali kota/wakil wali kota, serta di 115 kabupaten untuk memilih bupati/wakil bupati periode 2018-2023, perlu diintensifkan pemetaan potensi konflik yang mungkin terjadi. Salah satu kota yang melaksanakan pilkada serentak pada 27 Juni 2018 adalah Kota Bekasi. Kota Bekasi

---

<sup>4</sup> Surat Nomor 436/KPU/VII/2017 perihal Pendanaan Pemilihan Serentak Tahun 2018, Senin 31 Jul 2017, <http://kpu.go.id/index.php/post/read/2017/6406/Surat-Nomor-436KPUVII2017-perihal-Pendanaan-Pemilihan-Serentak-Tahun-2018>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017.

merupakan salah satu kota yang terdapat di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini merupakan bagian dari megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia.

Saat ini Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri<sup>5</sup>, kota Bekasi juga dijuluki sebagai Kota Patriot dan Kota Pejuang. Adapun luas Wilayah dan letak Geografis Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210.49 km<sup>2</sup>. Beberapa kejadian konflik yang disebabkan dan bersumber dari pemilihan kepala daerah di daerah Indonesia yang tercatat selama kurun waktu 2011 sampai dengan 2017 akan peneliti sampaikan fakta dan kejadian yang ada. Berdasarkan fakta yang ada terjadinya konflik yang diakibatkan oleh Pilkada yaitu pada tahun 2011 yang lalu bentrok yang terjadi antara pendukung pasangan calon Bupati di Puncak Jaya yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, ratusan massa dari tiga kubu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, di Kampung Pagaleme Distrik Pagalem, saling serang, pada Minggu, 2 Juli 2011. Fakta lainnya Kerusuhan itu

berlatar belakang pemilihan bupati dan wakil bupati yang berakibat satu orang dilaporkan tewas bernama Kolenga Wenda (45) dalam kerusuhan di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada Jumat 24 Februari 2011 yang disebabkan pada saat pelaksanaan pilkada 15 Februari lalu.

Dari kejadian kerusuhan yang disebabkan oleh pilkada dapat diambil bahwa permasalahan konflik yang disebabkan oleh pilkada serentak yang akan dilakukan pada 27 Juni 2018 diantaranya. Pertama, penyelenggara Pilkada kadang tidak netral. Ada banyak kasus yang memperlihatkan keberpihakan penyelenggara Pilkada terhadap kandidat tertentu. Awal Januari lalu, misalnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat 31 anggota komisi pemilihan umum dan panitia pengawas pemilu di daerah karena dianggap tidak netral. Kedua, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah. Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) selalu dimintai dalam pelibatan pengamanan agar dapat berjalan dengan lancar serta aman dalam

---

<sup>5</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Bekasi#cite\\_note-2](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bekasi#cite_note-2), diakses pada tanggal 12 Maret 2018.

pelaksanaan pilkada serentak baik pada tahap persiapan pilkada, selama pelaksanaan pilkada serta pada tahap akhir pilkada. Dengan demikian walaupun tugas TNI AD dalam penanggulangan konflik yang disebabkan oleh pilkada serentak di wilayah hanyalah bersifat membantu Pemerintah Daerah, namun bukan berarti tidak diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kesiapannya.

Yonif Mekanis 202/Tajimalela yang merupakan salah satu satuan yang berada di kota Bekasi yang rencana akan melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2018 dalam pemilihan walikota dan wakil walikota. Yonif Mekanis 202/Tajimalela sendiri merupakan satuan pelaksana berada dibawah komando dari Brigif 1/PIK, Kodam Jaya dapat dilibatkan dalam rangka Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 dinyatakan melaksanakan tugas perbantuan terhadap pemerintah daerah serta tugas perbantuan kepada POLRI. Pelibatan Yonif Mekanis 202/Tajimalela dalam OMSP pada operasi yang jangka waktu pelaksanaan operasi cukup panjang, diharapkan dapat memberikan bantuan yang diberikan bisa optimal serta terbentuk suatu sinergitas antara Polri dan

Pemda dalam penyelesaian konflik yang disebabkan oleh Pilkada baik sebelum, selama maupun sesudah dilaksanakannya Pilkada. Namun pada kenyataannya sinergitas yang terjadi antara Yonif Mekanis 202/Tajimalela dengan Pemda setempat dan Polri dalam penanggulangan konflik yang diakibatkan pilkada serentak masih belum maksimal dan optimal baik dalam sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan pilkada serentak di Kota Bekasi, ini dapat dilihat pada saat pelaksanaan Pilkada tahun 2012 yang lalu, pelibatan dari Yonif 202/Tajimalela tidak maksimal dan optimal serta terkesan berjalan sendiri – sendiri dan tidak adanya koordinasi dan komunikasi antar instansi yang ada di Kota Bekasi walaupun pada saat itu tidak terjadi hal – hal yang timbul yang dapat merugikan dan menghambat terlaksananya Pilkada serentak. Dengan minimnya keterlibatan TNI AD khususnya Yonif Mekanis dalam pelaksanaan pengamanan pada saat sebelum, selama serta setelah pilkada, sehingga atas dasar tersebut menjadi suatu pertimbangan bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini.

**Urgensi Sinergitas antara Yonif Mekanis 202/Tajimalela dengan Pemda dan Polri dalam Penanganan Potensi Konflik pada**

## **Pelaksanaan Pilkada Serentak di Kota Bekasi Tahun 2018**

Pada tahapan Sebelum, selama dan sesudah Pilkada, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan dengan melakukan studi wawancara terhadap beberapa narasumber dari ketiga instansi yaitu unsur TNI, Polri, dan juga Pemda. Melalui sinergitas 3 pilar antara Pemda, Polres dan Kodim melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pilkada sebagai bentuk dari penanganan atau pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya konflik dikalangan masyarakat. Lalu, apabila pihak dari Polres maupun Pemda memerlukan perbantuan lebih untuk menghadapi suatu kondisi yang tidak memungkinkan untuk dikendalikan maka, Kodim akan melakukan koordinasi kepada Komando Atas yang dalam hal ini akan meneruskan kepada Yonif Mekanis 202/Tajimalela untuk melakukan perbantuan.

Sesuai dengan teori sinergitas, Menurut Covey yang dikutip melalui jurnal pembangunan pada student jurnal mengartikan sinergisitas sebagai: “Kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan

keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, sinergitas dalam pembangunan berarti keterpaduan berbagai unsur pembangunan yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Covey menambahkan sinergitas akan mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai”.

Deardorf dan Williams (2006) menyatakan bahwa Sinergi adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual.<sup>7</sup> Sinergi bukanlah sesuatu yang dapat dipegang oleh tangan manusia tetapi suatu istilah yang berarti melipat gandakan pengaruh (*multiplier effect*) yang memungkinkan energi pekerjaan atau jasa individu berlipat ganda secara eksponensial melalui usaha bersama. Sinergi kelompok dideskripsikan sebagai

---

<sup>6</sup> Stephen R. Covey, Tujuh Kebiasaan Manusia yang sangat efektif, (Terj.) Budjianto, engan judul asli *The 7 Habits of Highly Effective People*, (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1997), p.21.

<sup>9</sup> Deardorff, Dale S. and Williams, Greg. 2006. *Synergy Leadership in Quantum. Organizations*. Fesserdorff Consultants. p.30.

tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekerja bersama secara sinkron satu sama lain sehingga mereka dapat bergerak dan berfikir sebagai satu kesatuan.

Jika sub-sub sistem bekerjasama, maka hasil yang diperoleh akan lebih efektif dibandingkan bekerja secara sendiri-sendiri. Sinergi sering dikaitkan dengan gabungan dimana dua organisasi yang bersatu akan lebih efisien dibandingkan dengan jika dua organisasi berjalan sendiri-sendiri, terutama pada organisasi-organisasi yang mengelola produk. Konsep sinergi pada prinsipnya bahwa, di dalam mencapai suatu tujuan, usaha yang dilakukan secara tersistem dan bersama-sama hasilnya akan lebih besar dibandingkan dengan secara sendiri-sendiri. Kegiatan bersama dari bagian yang terpisah, tetapi saling berhubungan secara bersama-sama akan menghasilkan efek total yang lebih besar dari pada jumlah bagian secara individu dan terpisah.

Menurut Najiyati dan Rahmat (dalam Triana Rahmawati, 2011:23), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan

lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu:

#### 1. Komunikasi.

Sofyandi dan Garniwa (2007:15), pengertian komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu:

- a. Pengertian komunikasi yang berorientasi pada sumber menyatakan bahwa, komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan.
- b. Pengertian komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan di mana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

#### 2. Koordinasi

Disamping adanya komunikasi dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Hasan (2005:18) bahwasannya "dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi". Silalahi (2011: 217), "koordinasi adalah

integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama". Moekijat (1994 : 39) menyebutkan ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu:

- a. Hubungan langsung. Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.
- b. Kesempatan awal. Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
- c. Kontinuitas. Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.
- d. Dinamisme. Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern.
- e. Tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif.
- f. Organisasi yang sederhana. Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif.

g. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan.

h. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik.

i. Kepemimpinan supervisi yang efektif. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka Sinergitas dapat diartikan kegiatan gabungan atau kerjasama yang dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan terhubung oleh beberapa peran yang berbeda namun terkait didalamnya.

Dalam proses sebelum, selama dan sesudah Pilkada yang telah dilakukan dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa instansi-instansi terkait saling melakukan interaksi berupa terjalinnya koordinasi yang berjalan dengan efektif sehingga menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar, ini terbukti dari respon masyarakat yang baik.

Apabila dikaitkan dengan teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu dengan teori sinergitas dari Deardorf dan Williams yang menyatakan bahwa Sinergi adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual. Sehingga, sesuai dengan teori sinergitas bahwa Yonif Mekanis 202/Tajimalela, Polres, dan juga Pemda Kota Bekasi melakukan kegiatan Sebelum Pilkada atau pencegahan konflik secara bersama dan terus melakukan koordinasi sehingga kegiatan pencegahan konflik dapat tercapai dengan efektif. Lebih lanjut dijelaskan dalam teori sinergitas bahwa Jika sub-sub sistem bekerjasama, maka hasil yang diperoleh akan lebih efektif dibandingkan bekerja secara sendiri-sendiri. Hal ini terbukti di lapangan bahwa dengan hasil kerjasama atau sinergi dari 3 unsur yaitu Yonif 202/Tajimalela, Polres, dan juga Pemda Kota Bekasi membuahkan hasil yang efektif dalam tahap Sebelum, selama dan sesudah Pilkada.

### **Sebelum Pilkada**

Dalam melakukan kegiatan kerjasama antara Yonif Mekanis 202/Tajimalela dengan Pemda dalam upaya penanganan

potensi konflik. Sebagaimana di jelaskan oleh Mayor Inf Kadek Abriwan sebagai Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 202/Tajimalela bahwa, kerjasama yang dilakukan dengan Pemda berjalan dengan baik, adapun kegiatan yang dilakukan dalam penanganan konflik di masyarakat diantaranya adalah melaksanakan pengamanan dalam meredam konflik yang ada, dengan mencari sumber permasalahan yang ada, serta melakukan kegiatan kemasyarakatan dengan selalu berkoordinasi dengan Pemda setempat.

Dalam mempersiapkan gelar Pilkada dan penanganan potensi konflik yang ditimbulkan menurut Ibu Junarsih selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi menyatakan bahwa, Pemerintah Kota Bekasi memberikan dukungan anggaran hibah Pilkada kepada Kodim 0507 sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan anggaran hibah kepada Kodam Jaya/Jayakarta. Untuk pembuatan Pos – pos pihak pemda Kota Bekasi sudah menyampaikan bahwa segala perencanaan kegiatan Kodam Jaya/Jayakarta maupun Kodim 0507 Bekasi sudah masuk dalam proposal hibah yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Bekasi atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, masing – masing

satuan tela memiliki pos – pos nya masing – masing namun hal ini dapat diatasi dengan sering melakukan koordinasi dengan diadakannya pos gabungan yang menadi titik kumpul dari berbagai satuan untuk pengamanan Pilkada Serentak ini.

Polres sebagai leading sector dengan didukung oleh Pemda dan Kodim 0507 (Yonif Mekanis 202/Tajimalela). Lalu, dilakukannya rapat koordinasi dalam pencegahan, pemetaan dan penanganan konflik. Lebih lanjut, Jika terjadi konflik yang ber eskalasi tinggi maka pihak Polres meminta penambahan kekuatan personel ke Kodim 0507/BS serta mengadakan rakor dengan instansi terkait di lingkungan Pemda.

### **Selama Pilkada**

Menurut Lettu Inf Sulaeman selaku Danki B Yonif Mekanis 202/Tajimalela, Selama Pilkada dalam penanganan potensi konflik yang diakibatkan Pilkada Serentak yaitu Yonif Mekanis 202/Tajimalela tetap akan mendapatkan informasi dari Kodim dan Koramil apabila di suatu daerah baik itu titik – titik yang telah ditentukan ataupun dikemudian diluar dari titik – titik rawan timbul konflik, maka Kodim, Polres, maupun Pemda dapat melakukan Koordinasi / komunikasi dengan Komando Atas meminta perbantuan kepada Yonif

Mekanis 202/Tajimalela apabila memang kondisi sudah tidak bisa lagi di tangani oleh Polres, Pemda maupun Kodim/Koramil. Apabila sampai terjadi suatu tindakan penjarahan di lingkungan masyarakat, maka Yonif Mekanis 202/Tajimalela sebagai pengaman wilayah maka akan melakukan tindakan tentunya atas koordinasi / komunikasi yang telah dilakukan oleh Polres maupun Pemda.

Selama Pilkada, Polres berperan sebagai leading sektor dengan dukungan dari Pemda dan Kodim. Dalam tataran ini turut sertanya Kodim 202/Tajimalela bisa ikut turun dalam memberikan penanganan konflik.

Pada Selama Pilkada, Polres Kota Bekasi memiliki peran yang signifikan dimana Polres Kota Bekasi menjadi leading sektor dalam langkah perwujudan keamanan nasional. Komunikasi yang terjalin dalam instansi-instansi yang ada terjalin dengan baik dimana Polres Kota Bekasi melakukan Komunikasi Muspida di Wilayah Bekasi Kota terjalin dengan cukup baik. Koordinasi yang dilakukan antara Polres Kota Bekasi, Kodim dan Pemda Kota Bekasi pada Selama Pilkada yang mana dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan pendapat dalam menyikapi konflik yang ada.

## **Pasca Pilkada**

Dalam proses pemulihan Pasca Pilkada, Yonif Mekanis memberikan bantuan berupa perbaikan kerusakan yang ditimbulkan akibat konflik bersama Pemda dan juga Polres Kota Bekasi. Lalu, Pemda, Polres dan juga Kodim dan juga Yonif Mekanis 202/Tajimalela terus menerus melakukan koordinasi dalam penanganan Pasca Pilkada agar kedepannya menjadi terarah.

Pemda Kota Bekasi berfokus kepada pemulihan psikologi melalui konseler untuk memberikan konseling sehingga penanganana *post traumatic* dapat dikurangi dan membuat masyarakat Kota Bekasi dapat melupakan tragedi yang memilukan tersebut. Selain hal-hal tersebut Pemda juga melakukan pemberian bantuan kerusakan akibat konflik.

Mengadakan kegiatan penjagaan dan patrol tempat-tempat rawan konflik secara berkala dan bersama (Cipta Kondisi) hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya pengkondisian kembali lingkungan masyarakat di Kota Bekasi dari konflik yang terjadi sebelumnya.

Dengan demikian Sinergitas antara Yonif Mekanis 202/Tajimalela dengan Pemda dan Polri dalam penanganan konflik pada pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di Kota Bekasi sangat penting,

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa dengan adanya sinergitas antara Yonif Mekanis 202/Tajimalela, Kodim, Polres, dan juga Pemda Kota Bekasi situasi dan kondisi selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Kota Bekasi dapat aman dan terkendali sehingga tidak menimbulkan eskalasi konflik yang besar, akan tetapi meskipun begitu unsur – unsur terkait sudah menyiapkan penanganan opsi terburuk yang dalam hal ini timbulnya eskalasi konflik yang besar.

## **Bentuk Sinergitas antara Yonif Mekanis 202/Tajimalela dengan Pemda dan Polri dalam Penanganan Potensi Konflik pada Pelaksanaan Pilkada Serentak di Kota Bekasi Tahun 2018**

Bentuk kegiatan dari sinergitas antara Yonif Mekanis 202/Tajimalela dengan Pemda dan Polri yang dalam ini adalah Pemda dan Polres Kota Bekasi yaitu dengan melakukan koordinasi 3 pilar, melakukan patroli bersama, pembuatan pos – pos pengamanan di daerah–daerah rawan konflik, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan ketika terjadinya konflik maka unsur–unsur terkait akan melakukan koordinasi lebih lanjut mengenai penanganan konflik dan ketika setelah terjadinya konflik dilakukan

kegiatan perbantuan kepada masyarakat yang terdampak konflik seperti penyembuhan psikis dan juga perbantuan lainnya seperti kerusakan harta benda.

Berkaitan dengan teori penyebab konflik menurut Imam Hidayat dalam bukunya yang berjudul *Teori–Teori Politik* yang menyatakan bahwa Konflik sebagai akibat dari menajamnya perbedaan dan kerasnya benturan kepentingan yang saling berhadapan, disebabkan oleh beberapa latar belakang yang ada. Pertama, adanya latar belakang sosial politik, ekonomi dan sosial budaya yang berbeda dan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kedua, adanya pemikiran yang menimbulkan ketidaksepahaman antara yang satu dengan yang lain. Ketiga, adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak, sistem dan mekanisme yang ada dalam organisasi. Keempat, adanya rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi, sikap frustrasi, rasa tidak senang, dan lain-lain, sementara tidak dapat berbuat apa-apa dan apabila harus meninggalkan kelompok, berarti harus menanggung resiko yang tidak kecil. Kelima, adanya dorongan rasa harga diri yang berlebih-lebihan dan berakibat pada

keinginan untuk berusaha sekuat tenaga untuk melakukan rekayasa dan manipulasi.

Selanjutnya, Konflik juga sebagai akibat dari menajamnya perbedaan dan kerasnya benturan kepentingan yang saling berhadapan, disebabkan oleh beberapa latar belakang yang ada. Pertama, adanya latar belakang sosial politik, ekonomi dan sosial budaya yang berbeda dan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kedua, adanya pemikiran yang menimbulkan ketidaksepahaman antara yang satu dengan yang lain. Ketiga, adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak, sistem dan mekanisme yang ada dalam organisasi. Keempat, adanya rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi, sikap frustrasi, rasa tidak senang, dan lain-lain, sementara tidak dapat berbuat apa-apa dan apabila harus meninggalkan kelompok, berarti harus menanggung resiko yang tidak kecil. Kelima, adanya dorongan rasa harga diri yang berlebih-lebihan dan berakibat pada keinginan untuk berusaha sekuat tenaga untuk melakukan rekayasa dan manipulasi (Hidayat,2002, p.124)<sup>8</sup>

---

<sup>11</sup> Hidayat, Imam, 2002, *Teori-teori Politik*, PA. Nurul Abyadh dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm.124.

Simon Fisher (2001, p.7-8) menjelaskan teori penyebab konflik dalam masyarakat. Pertama, teori hubungan masyarakat, bahwa konflik yang terjadi lebih disebabkan polarisasi, ketidakpercayaan (*distrust*) maupun permusuhan antar kelompok yang berada ditengah-tengah masyarakat kita. Kedua, teori negosiasi prinsip, bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Ketiga, teori kebutuhan manusia, bahwa konflik yang muncul ditengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut. Keempat, teori identitas, bahwa konflik lebih disebabkan identitas yang terancam atau berakar dari hilangnya sesuatu serta penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan. Kelima, teori transformasi konflik, bahwa konflik disebabkan oleh hadirnya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ranah kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan.

Selanjutnya, berdasarkan teori pengelolaan konflik, dalam konteks demokrasi ada perubahan pemahaman mengenai konflik politik, dimana konflik

tidak lagi dipahami sebagai aktifitas yang negatif, buruk, dan merusak, tetapi sebaliknya konflik merupakan aktifitas yang positif dan dinamis. Hal ini berlanjut pada perubahan konsepsi penyelesaian konflik menjadi pengelolaan konflik (*management conflict*). Ini sebuah perbedaan sangat penting. Pertama, penyelesaian konflik menunjuk pada penghentian atau penghilangan suatu konflik, dengan demikian implikasinya adalah konflik merupakan sesuatu yang negatif, yang bisa diselesaikan, diakhiri, bahkan dihapuskan. Kedua, berbeda dengan penyelesaian konflik, pengelolaan konflik lebih memberi pemahaman bahwa konflik bisa positif, bisa juga negatif. Meskipun makna istilah-istilah tadi tentu masih menjadi perdebatan (*debatable*) hal ini menunjukkan bahwa persoalan konflik memiliki berbagai pendekatan termasuk istilah-istilahnya.

Ada beberapa pendekatan untuk menangani konflik, yang terkadang juga dipandang sebagai tahap-tahap dalam

suatu proses. Fisher, dkk (2001, p.6-7)<sup>9</sup> menggambarkan sebagai berikut. Pertama, istilah pencegahan konflik yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. Kedua, penyelesaian konflik bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian. Ketiga, pengelolaan konflik bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Keempat, resolusi konflik yaitu kegiatan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Kelima, transformasi konflik yaitu kegiatan mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Mengelola konflik yaitu bagaimana menanganinya dengan cara yang konstruktif, bagaimana membawa pihak-pihak yang bertikai bersama dalam suatu

proses yang kooperatif, bagaimana merancang sistem kooperatif yang praktis dan dapat dicapai untuk mengelola perbedaan secara konstruktif, bukan sebaliknya mengadvokasi metode-metode untuk menghilangkan konflik (Harris dan Reilly, 2000, p.20)<sup>10</sup>.

Manajemen konflik merupakan sebuah sistem tawar-menawar dan bernegosiasi, dimana dalam konteks demokrasi dapat membantu mengatasi konflik antar kelompok dan menggiring mereka ke dalam dialog dan debat politik, dan menjauhkan mereka dari kekerasan di jalan. Tujuan manajemen konflik adalah menjaga supaya perselisihan yang ada bisa disalurkan ke dalam arena negosiasi dan mencegahnya jangan sampai mengalami peningkatan yang berujung pada konfrontasi dan kekerasan (Sisk dkk, 2002, p.96)

Ada beberapa hal yang tercakup dalam konsep manajemen konflik menurut Boulding (Liliweri, 2005, p.289) seperti<sup>11</sup>: (1) adanya pengakuan bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada konflik; (2) Analisis situasi yang menyertai

---

<sup>12</sup> Fisher, Simon, dkk., 2001, *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, The British Council Indonesia, Jakarta, p. 6-7.

<sup>13</sup> Harris, Peter, dan Reilly Ben (ed), \ 2000, *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*, International Institute

*Democracy and Electoral Assistance*, Jakarta, p.20.

<sup>14</sup> Liliweri, Alo, 2005, *Prasangka dan Konflik (Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur)*, LKIS, Yogyakarta, p. 289.

konflik, misalnya mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, apakah konflik berhubungan dengan nilai, tujuan, cara, teritori, atau kombinasi dari faktor-faktor tadi; (3) Analisis perilaku semua pihak yang terlibat; (4) Tentukan pendekatan konflik yang dapat dijadikan model penyelesaian; (5) Fasilitas komunikasi, yaitu membuka semua jalur komunikasi baik langsung maupun tidak langsung, diskusi dan dialog, dalam rangka hearing; (6) Negosiasi yaitu teknik untuk melakukan perundingan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik; (7) Rumuskan beberapa anjuran, tekanan, dan konfirmasi bagi kelestarian relasi selanjutnya; (8) Hiduplah dengan konflik, karena semua konflik tidak dapat dihilangkan kecuali dapat ditekan atau ditunda kekerasannya.

Maka dari itu apabila dikaitkan dengan fenomena yang peneliti angkat, instansi-instansi terkait yaitu Yonif Mekanis 202/Tajimalela dengan Pemda dan Polres Kota Bekasi sudah melakukan koordinasi dan memetakan penyebab – penyebab munculnya konflik di daerah yang rawan konflik, yang selanjutnya dilakukannya sosialisasi dari instansi-instansi terkait sebagai wujud dari sinergitas antara Yonif Mekanis 202/Tajimalela dengan Pemda dan Polres

Kota Bekasi dalam tahap pencegahan timbulnya konflik yang disebabkan oleh Pilkada Serentak.

Pada Selama Pilkada yang ditimbulkan akibat Pilkada Serentak, Polres berperan sebagai *leading sector* dengan dukungan dari Pemda dan Kodim. Kemudian dalam hal ini Kendala yang ditemui adalah Yonif Mekanis 202/Tajimalela tidak bisa melakukan tindakan lebih, jadi hanya tindakan pelumpuhan saja kepada pelaku kerusuhan yang selanjutnya akan diserahkan kepada Polres untuk ditindak lebih lanjut. Selanjutnya adalah kendala mengenai anggaran, koordinasi, dan aturan / regulasi mengenai pemberian anggaran terhadap penanganan konflik pilkada serentak yang pada setiap masing-masing instansi berbeda persepsi.

Menurut teori konflik yang dinyatakan oleh Harris dan Reilly bahwa mengelola konflik yaitu bagaimana menanganinya dengan cara yang konstruktif, bagaimana membawa pihak-pihak yang bertikai bersama dalam suatu proses yang kooperatif, bagaimana merancang sistem kooperatif yang praktis dan dapat dicapai untuk mengelola perbedaan secara konstruktif, bukan sebaliknya mengadvokasi metode-metode untuk menghilangkan konflik.

Dalam hal ini Yonif 202/Tajimalela, Polres, dan juga Pemda Kota Bekasi melakukan koordinasi mengenai cara untuk penanganan konflik sehingga dapat berjalan dengan efektif.

Dengan melakukan koordinasi mengenai cara penanganan konflik yang dilakukan oleh Yonif Mekanis 202/Tajimalela dengan Pemda dan Polres Kota Bekasi merupakan bentuk dari sinergitas. Apabila merujuk kepada teori sinergitas menurut Najiyati dan Rahmat (mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Hal ini tentu yang telah dilakukan oleh Yonif Mekanis 202/Tajimalela dengan Pemda dan Polres Kota Bekasi sudah bersinergi dalam tahap ketika konflik dengan adanya rapat koordinasi untuk memploting dan membagi tiap – tiap instansi untuk ditempatkan di titik – titik rawan konflik dan juga komunikasi Muspida di wilayah Kota Bekasi berjalan dengan baik sehingga proses penanganan ketika konflik yang telah dilakukan telah berjalan dengan efektif dan menghasilkan output yang

lebih baik dikarenakan adanya kombinasi dan paduan unsur yang saling bersinergi.

Dalam proses pemulihan Pasca Pilkada, pemda melakukan kegiatan berupa pemulihan psikologi melalui konseler untuk melakukan sesi konseling lalu pemda juga memberikan bantuan berupa perbaikan kerusakan yang ditimbulkan akibat konflik. Lalu, Pemda, Polres dan juga Kodim dan juga Yonif Mekanis 202/Tajimalela terus menerus melakukan koordinasi dalam penanganan Pasca Pilkada agar kedepannya menjadi terarah.

### **Kendala**

Pada saat kegiatan kerjasama antara Yonif Mekanis 202/Tajimalela dengan Pemda dalam upaya penanganan potensi konflik mengalami beragam kendala, akan tetapi dapat diselesaikan, hal lainnya tentang birokrasi antara pemda dan instansi militer yang diakibatkan banyaknya serta padatnya kegiatan yang dilakukan oleh satuan sendiri.

Terdapat kendala pada penyampaian kepada seluruh masyarakat yang dalam hal ini tidak semua masyarakat bisa hadir dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Pemda, namun hal ini juga dapat teratasi dengan pemberian sosialisasi kepada pejabat RW wilayah setempat agar

dapat di sampaikan kepada pejabat RT dan kemudian disampaikan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu, pihak Pemda menjelaskan bahwa kendala yang dialami selanjutnya adalah terkait masalah perencanaan anggaran karena waktu terjadinya konflik memang tidak dapat diketahui secara pasti.

Kendala yang ditemui dalam penanganan potensi konflik yaitu Yonif Mekanis 202/Tajimalela tidak bisa melakukan tindakan lebih, jadi hanya tindakan pelumpuhan saja kepada pelaku kerusuhan yang selanjutnya akan diserahkan kepada Polres untuk ditindak lebih lanjut. Selanjutnya adalah kendala mengenai anggaran, koordinasi, dan aturan / regulasi mengenai pemberian anggaran terhadap penanganan konflik pilkada serentak yang pada setiap masing-masing instansi berbeda persepsi.

Ada beberapa kendala yang dialami oleh Pemda Kota Bekasi yaitu pada Anggaran, koordinasi dan aturan/regulasi tentang pemberian anggaran yang berbeda persepsi antar instansi. Hal ini cukup mempengaruhi karena keterbatasan anggaran yang dimiliki akan juga membatasi ruang gerak prajurit Kodim 202/Tajimalela sehingga beberapa saran diberikan untuk semakin

memberikan hasil yang baik bagi stabilitas keamanan dan pertahanan bangsa dari berbagai konflik yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu perlu diperlukan regulasi untuk menyamakan persepsi dan interpretasi sehingga dalam proses pemberian anggaran tidak terjadi kesalahan.

Lalu, kendala terakhir yang dihadapi adalah permasalahan waktu yang kurang mencukupi dalam proses pemulihan Pasca Pilkada sehingga personil yang bertugas untuk memulihkan kondisi di masyarakat membutuhkan kesabaran yang lebih. Selebihnya tidak ada kendala yang cukup berarti dalam kegiatan pemulihan Pasca Pilkada yang ditimbulkan oleh Pilkada Serentak di masyarakat.

Semua kendala yang terjadi dapat teratasi dengan koordinasi dan sinergitas yang terjalin antar instansi terkait.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sinergitas antara Yonif Mekanis 202/Tajimalela dengan Pemda dan Polri dalam penanganan konflik pada pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di Kota Bekasi ini dapat dikatakan cukup optimal sehingga penanganan konflik pada pelaksanaan Pilkada serentak

2018 di Kota Bekasi terkait sudah berjalan cukup efektif.

Sinergitas antara Yonif Mekanis 202/Tajimalela dengan Pemda dan Polri dalam penanganan konflik pada pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di Kota Bekasi yaitu:

1. Sebelum Pilkada, kerjasama dilakukan melalui sinergitas 3 pilar antara Pemda, Polres dan Kodim dimana Polres sebagai leading sector sedangkan Pemda serta Kodim 0507 dan dalam hal ini Yonif Mekanis 202/Tajimalela sebagai pendukung. Lalu, dilakukan koordinasi terkait pemetaan daerah–daerah rawan konflik sehingga dapat direncanakan langkah–langkah pencegahan konflik di daerah–daerah tersebut. Pihak Yonif Mekanis 202/Tajimalela melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Pilkada Serentak dan juga dengan berkoordinasi dengan Kodim dan juga Polres Kota Bekasi. Yonif Mekanis 202/Tadijmalela melakukan patroli bersama dengan Polres ke Pos–pos wilayah yang telah dibentuk dan juga melakukan patrol ke jalan raya dengan menggunakan kendaraan dinas berupa kendaraan ringan atau SPM.
2. Selama Pilkada, Polres melakukan sinergitas dengan instansi terkait yaitu

dengan memploting dan membagi anggota Kodim dan anggota Polres di titik–titik rawan konflik. Lalu, melakukan pengamanan dan Patroli Cipta Kondisi secara bersama. Dan juga dari pihak Yonif Mekanis 202/Tajimalela akan melakukan perbantuan apabila dari pihak Polres, Pemda, dan juga Kodim sudah berkomunikasi dengan komando atas agar dilakukan perbantuan tugas.

3. Pasca Pilkada, Pada saat bila terjadinya konflik yang ditimbulkan akibat Pilkada Serentak, Polres berperan sebagai leading sector dengan dukungan dari Pemda dan Kodim. Kemudian dalam hal ini kendala yang ditemui adalah Yonif Mekanis 202/Taji Malela tidak bisa melakukan tindakan lebih, jadi hanya tindakan pelumpuhan saja kepada pelaku kerusuhan yang selanjutnya akan diserahkan kepada Polres untuk ditindak lebih lanjut.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Beilharz, Peter, Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filsof Terkemuka, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2003.
- Covey, Stephen R, 1997, Tujuh Kebiasaan Manusia yang sangat efektif, (Terj.) Budjianto, dengan judul asli The 7 Habits of Highly Effective People, Bina Rupa Aksara.

- Deardorff, Dale S. and Williams, Greg. 2006. *Synergy Leadership in Quantum Organizations*. Fesserdorff Consultants.
- Fisher, Simon, dkk., 2001, *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, The British Council Indonesia, Jakarta
- Harahap, 2005, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, PT Gunung Agung Jakarta.
- Hasan ,2005, *Koordinasi Dalam Suatu Manajemen Organisasi*, PT Gunung Agung Jakarta.
- Harris, Peter, dan ReillyBen (ed), \ 2000, *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*, International Institute Democracy and Electoral Assistance, Jakarta.
- Hidayat, Imam, 2002, *Teori-teori Politik*, PA. Nurul Abyadh dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hidayat,2002, *Konflik Sosial Dalam Masyarakat*, Jakarta, Gunung Agung
- J.C. Johari, 1985, *International Relations and Politics: Theoretical Perspective*, Streling Publisher, New Delhi.
- Johnson, Doyle P, 1990, diterj. Robert M.Z.Lawang, *Teori Sosiologi Klasik Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lofland, J. dan Lofland, L.H. 1995. *Analyzing Social Settings: a guide to qualitative observation and analysis*. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.
- Liliweri, Alo, 2005, *Prasangka dan Konflik (Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur)*, LKIS, Yogyakarta
- Masyahuri dan M, Zainudin. 2008, *Metodologi Penelitian*, Malang: Aditama.
- Miles dan A. Michael Huberman, 1992.Hal: 15-17
- Moleong, Lexy, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moekijat ,1994, *Manajemen dan Fungsinya*, PT Erlangga, Jakarta
- Nasution, M.A. 2004. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Poerwandari, K. 2011. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3, Universitas Indonesia.
- Ramlan Surbakti, 2008, *Sistem pemilu dan tatanan politik demokrasi*, dalam ramlan surbakti, dkk (Ed.), *Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan tata politik demokratis*, Kemitraan Jakarta
- Ritzer, George & Goodman, Douglas J, 1997, *Teori Sosiologi Modern*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rhenald Kasali dalam *Manajemen Public Relations: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta
- Simon Fisher , 2001, *Society Conflict and Management*,
- Silalahi, 2011, *Pengantar Manajemen Publik*, PT Armico, Bandung
- Sofyandi dan Garniwa,2007, *Komunikasi Dalam Interaksi Kelambagaan*, PT Mizan Bandung.
- Stephen P. Robbins ,1974, *Managing Organizational Conflict* , dalam Anas Urbaningrum (1998), *Ranjau - Ranjau Reformasi: Potret Konflik Politik Pasca Kejatuhan*.
- Sugiyono. 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Triana Rahmawati, Irwan Noor, Ike Wanusmawatie, *Jurnal tentang "Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah"*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, p. 3.

## **Internet**

berkas.dpr.go.id

Bawaslu.go.id

Surat Nomor 436/KPU/VII/2017 perihal Pendanaan Pemilihan Serentak Tahun 2018, Senin 31 Jul 2017, <http://kpu.go.id/index.php/post/read/2017/6406/Surat-Nomor-436KPUVII2017-perihal-Pendanaan-Pemilihan-Serentak-Tahun-2018>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017.

<http://www.beritasatu.com/nasional/439500-aksi-saling-serang-pendukung-calon-bupati-puncak-jaya-17-rumah-terbakar.html>, diakses pada tanggal 17 Mei 2018.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170224162402-12-195999/satu-orang-tewas-dalam-kerusuhan-pilkada-intan-jaya-di-papua>, diakses pada tanggal 17 Mei 2018.

<https://nasional.sindonews.com/read/1247595/16/rusuh-soal-pilkada-1507767176m>, diakses pada tanggal 17 Mei 2018.

<http://www.berdikarionline.com/konflik-pilkada/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2018.

<https://media.neliti.com/media/publications/116989-ID-peran-pemerintah-kabupaten-karo-dalam-pe.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/79007-ID-sinergitas-stakeholders-dalam-inovasi-da.pdf>.

<http://lampungbarometer.com/inspirasi-dan-apresiasi.html>.

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pemerintah No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Undang-Undang No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

